

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kebijakan Publik

Untuk menyelesaikan suatu masalah, pemerintah mempunyai alat yaitu sebuah kebijakan. Dewey mengatakan bahwa kebijakan publik menitikberatkan pada “publik dan problem-problemnya”. Dikatakan oleh Heidenheimer bahwa “Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu- isu dan persoalan tersebut disusun dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan ke dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah”.

Secara luas, kebijakan publik menurut Robert Eyestone dalam Winarno (2008:17) didefinisikan sebagai hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Selanjutnya Carl J Friedrich dalam Winarno (2008:17) mendefinisikan kebijakan adalah suatu arahan tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Sementara itu, James E. Anderson dalam Winarno (2008:18) menjelaskan bahwa “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Kebijakan negara itu berupa program-program pemerintah.

Menurut Abdul Wahab (2005:3) kebijakan adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Pemikiran Santoso dalam Winarno (2008:19) mengenai kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Anderson dalam Winarno (2008:20) menjelaskan implikasi dari konsep kebijakan publik yaitu :

- a) Kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan
- b) Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri
- c) Kebijaksanaan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah
- d) Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan dituangkan dalam peraturan resmi yang ditunjukkan untuk mengatur masyarakat yang merupakan cermin kehendak rakyat.

Konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yaitu:

- a. Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.
- b. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.

- c. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Suatu kebijakan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan para aktor kebijakan melalui proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis dalam proses kebijakan publik tersebut menurut William N. Dunn melalui 5 tahap yang meliputi :

1. Tahap Perumusan Masalah

Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.

2. Tahap Forecasting (Peramalan)

Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.

3. Tahap Rekomendasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

4. Tahap Monitoring Kebijakan

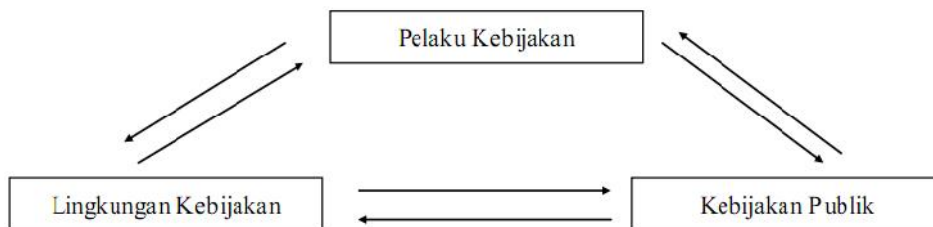
Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

## 5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh Dunn, mengatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan 3 elemen yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan.

Gambar 2.  
Hubungan Tiga Elemen Sistem Kebijakan



( dalam Subarsono, 2006 : 15)

Menurut pendapat Ramelan Surbakti (1992:96) menjelaskan pada dasarnya kebijakan publik di bedakan menjadi tiga macam yaitu :

- a. Kebijakan publik Ekstraktif, yaitu penyerapan sumber-sumber materiil dan sumber daya manusia yang ada pada masyarakat.
- b. Kebijakan Publik Distributif yaitu pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi artinya pembagian secara relatif merata kepada semua anggota masyarakat. Alokasi artinya yang mendapat bagian cenderung kelompok masyarakat tertentu sesuai skala prioritas yang ditetapkan atau sesuai situasi yang dihadapi waktu itu.

- c. Kebijakan Publik Regulatif yaitu pengaturan perilaku anggota masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik digunakan oleh pemerintah sebagai dasar tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat Negara adalah negara hukum, sehingga hukum menjadi batas, penentu, dasar dan cara tindakan pemerintah serta segala instansi terkait dalam mencapai tujuan. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan kebijakan publik distributif yang dibuat oleh pemerintah pusat guna menanggulangi kemiskinan karena kebijakan ini ditujukan pada kelompok sasaran tertentu yaitu masyarakat miskin.

## **B. Modal Kerja**

### **1. Pengertian Modal Kerja**

Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula di maksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Pengertian modal kerja atau *working capital* menurut Djarwanto (2001) adalah berhubungan dengan keseluruhan dana yang digunakan selama periode akuntansi tertentu yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan untuk periode akuntansi yang bersangkutan (*current income*). Agnes Sawir (2002) dan Umar (2002) mengemukakan bahwa modal kerja adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek, seperti kas, sekuritas yang mudah dipasarkan, piutang usaha dan persediaan dalam beberapa perusahaan, biaya di bayar di muka.

Menurut S. Sundjaja dan Inge Barlian dalam bukunya “Manajemen Keuangan” menyatakan bahwa “Modal kerja yaitu aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi yang berputar dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu usaha” (2002:155). Sedangkan menurut Munawir (2004) modal kerja adalah kelebihan nilai aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal kerja adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek dalam bentuk kas, sekuritas, piutang dan persediaan yang digunakan untuk memenuhi kegiatan operasi perusahaan.

Djarwanto (2001) mengemukakan bahwa pada umumnya modal kerja suatu perusahaan berasal dari berbagai sumber, yaitu:

- a) Hasil operasi perusahaan
- b) Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka pendek)
- c) Penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar
- d) Penjualan saham atau obligasi
- e) Dana pinjaman dari bank dan pinjaman jangka pendek lainnya

## **2. Jenis Modal Kerja**

Jenis-jenis modal kerja menurut Sawir (2005), dapat digolongkan sebagai berikut:

### **a) Modal Kerja Permanen**

Yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Modal kerja permanen dapat dibedakan lagi dalam:

1) Modal Kerja Primer

Yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin komunitas usaha.

2) Modal Kerja Normal

Yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal dalam artian yang dinamis.

**b) Modal Kerja Variabel**

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan.

Modal kerja ini dapat dibedakan, yaitu:

1) Modal Kerja Musiman

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim.

2) Modal Kerja Siklis

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur.

3) Modal Kerja Darurat

Yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena darurat yang tidak diketahui sebelumnya.

**3. Penentuan Kebutuhan Modal Kerja**

Menurut Sutrisno (2000: 56), untuk menentukan besarnya modal kerja, bisa digunakan beberapa metode penentuan besarnya modal kerja, yaitu:



**a) Metode Keterikatan Dana**

Untuk menentukan besarnya modal kerja dengan metode ini, maka perlu diketahui dua faktor yang mempengaruhi, yakni:

- 1) Periode terikatnya modal kerja adalah jangka waktu yang diperlukan mulai kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi.
- 2) Proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari merupakan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan baku, bahan penolong, pembayaran upah, pembayaran biaya pemasaran, dan pembayaran-pembayaran tunai lainnya.

**b) Metode Perputaran Modal Kerja.**

Dengan metode ini besarnya modal kerja ditentukan dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan.

**4. Dana bergulir sebagai Modal Kerja**

Dana bergulir PNPM-MP adalah pinjaman jangka pendek yang didapatkan KSM untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan kekuatan modal sosial. Dana bergulir sebagai modal kerja digunakan untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada agar kegiatan usaha KSM dapat beroperasi dengan baik. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pinjaman dana bergulir merupakan modal kerja yang didapatkan dari pinjaman jangka pendek, hal tersebut sesuai dengan yang

dikemukakan Djarwanto (2001) bahwa kebutuhan modal kerja dapat dibiayai dari hasil operasi perusahaan, pinjaman bank dan pinjaman jangka pendek lainnya.

## **C. Pendapatan**

### **1. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan merupakan hasil yang didapatkan karena seseorang telah berusaha sebagai ganti atas jerih payah yang telah dikerjakannya.

Pendapatan industri adalah pendapatan yang diperoleh karena telah mengorganisasikan seluruh faktor – faktor produksi yang dikelolanya (William A. Eachern, 2001 : 98).

Pendapatan yaitu pendapatan yang diperoleh dari jumlah produk fisik yang dihasilkan dikalikan dengan harga jualnya atau dalam persamaan matematik dapat dinyatakan (William A. Eachern, 2001 : 98) :

$$TR = P \times Q$$

Dimana TR = Penerimaan Total atau Pendapatan

P = Harga Jual Produk

Q = Jumlah produksi yang terjual

Pendapatan bersih merupakan pendapatan bruto setelah dikurangi dengan biaya – biaya dalam proses produksi. Biaya yang dimaksud disini adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang dikeluarkan saat proses produksi berlangsung, demi untuk menghasilkan suatu produk tertentu

Dalam teori ekonomi mikro tujuan perusahaan adalah mencari laba (*profit*) (Rahardja dan Manurung 2002:141). Secara teoritis pendapatan adalah kompensasi atas resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Makin besar resiko pendapatan yang diperoleh harus semakin besar.

Laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan (TR) dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan (TC) secara matematis dapat dirumuskan

$$= TR - TC$$

Perusahaan dikatakan memperoleh laba kalau nilai positif  $T (> 0)$  dimana  $TR > TC$ . Laba maksimum (*maximum profit*) tercapai bila nilai mencapai maksimum. Secara lebih jelasnya, fungsi TR dan fungsi TC dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

$$TR = Q \cdot Pq$$

Keterangan : TR = Penerimaan total

Q = Jumlah produk

Pq = Harga produk

Sedangkan fungsi TC (biaya total) adalah total pengeluaran terendah yang diperlukan untuk memproduksi setiap tingkat output q. TC meningkat saat q meningkat, didefinisikan sebagai berikut :

$$TC = FC + VC$$

Rata-rata biaya atau *Average Total Cost* (ATC) adalah ongkos produksi dari setiap unit output yang dihasilkan.

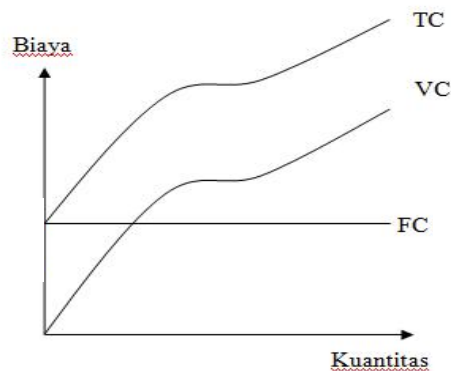
$$ATC = \frac{TC}{Q}$$

Marginal cost (MC) adalah kenaikan dari total penerimaan yang diakibatkan oleh diproduksinya tambahan satu unit output.

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta TVC}{\Delta Q}$$

Secara grafik dapat ditunjukkan dari gambar dibawah ini

Gambar 3.  
Fungsi TC



Menurut pratama rahardja dan manurung (2002:141). Terdapat tiga pendekatan dalam memaksimalkan pendapatan yaitu:

### 1. Pendekatan Totalitas (*Totality approach*)

Pendekatan totalitas membandingkan pendapatan total (TR) dan biaya total (TC). pendapatan total (TR) adalah sama dengan jumlah unit output yang terjual (Q) dikalikan dengan harga output perunit (P). Maka  $TR = P \times Q$ , sedangkan biaya total (TC) adalah sama dengan biaya tetap (FC) ditambah dengan biaya variabel (VC) maka  $TC = FC + VC$ .

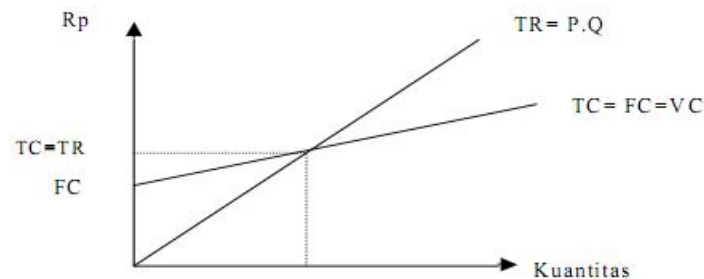
Dalam pendekatan totalitas, biaya variabel perunit output dianggap konstan, sehingga biaya variabel adalah jumlah output (Q) dikalikan dengan biaya variabel per unit. Jika variabel per unit adalah V maka  $VC = V \times Q$

$$= P \times Q - (FC + VQ) \dots \dots \dots (2.1)$$

Persamaan 2.1 dapat dipresentasikan dalam gambar 2.1 Dalam gambar tersebut terlihat bahwa pada awalnya perusahaan mengalami kerugian, terlihat dari kurva TR yang masih di bawah kurva TC. Tetapi jika output ditambah kerugian makin kecil, terlihat dari makin mengecilnya jarak kurva TC. Pada saat jumlah output mencapai  $Q^*$ , kurva TR berpotongan dengan kurva TC yang artinya pendapatan total sama dengan biaya total. Titik perpotongan ini disebut dengan titik impas (*Break Event Point*). Setelah titik BEP, perusahaan terus mengalami laba yang makin membesar.

Implikasi dari pendekatan totalitas adalah perusahaan menempuh strategi penjualan maksimum (*maximum selling*). Sebab makin besar penjualan makin besar laba yang diperoleh. Perusahaan harus menghitung beberapa unit output yang harus diproduksi ( $Q^*$ ) untuk mencapai titik impas. Jika persentasenya 80% maka untuk mencapai BEP perusahaan harus menjangkau 80% potensi permintaan efektif. Makin kecil  $Q^*$  dan atau makin kecil persentase  $Q^*$  terhadap potensi permintaan efektif dianggap baik, maka sebab risiko pun semakin kecil.

Gambar 4.  
Kurva TR dan TC



Cara menghitung  $Q^*$  dapat diturunkan dari persamaan (2.1)

$$= P.Q^* - (FC + V.Q^*) \dots \dots \dots (2.2)$$

Titik impas tercapai pada saat sama dengan nol

$$0 = P.Q^* - FC - V.Q^*$$

$$= P.Q^* - V.Q^* - FC$$

$$= (P - V)Q^* - FC$$

$$Q^* = \frac{FC}{P - V} \dots \dots \dots (2.3)$$

## 2. Pendekatan Rata-rata (*Average Approach*)

Dalam pendekatan ini perhitungan laba per unit dilakukan dengan

membandingkan antara biaya produksi rata-rata (AC) dengan harga jual output

(P) laba total adalah laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual

$$= (P - AC).Q \dots \dots \dots (2.4)$$

dari persamaan ini perusahaan akan mencapai laba bila harga jual per unit

output (P) lebih tinggi dari biaya rata-rata (AC) perusahaan hanya mencapai

angka impas bila P sama dengan AC.

Keputusan untuk memproduksi atau tidak didasarkan perbandingan besarnya  $P$  dengan  $AC$ . Bila  $P$  lebih kecil atau sama dengan  $AC$ , perusahaan hanya mencapai angka impas bila  $P=AC$ . Keputusan untuk memproduksi didasarkan pada perbandingan antara  $P$  dengan  $AC$ . Bila  $P$  lebih kecil atau sama dengan  $AC$  maka perusahaan tidak mau memproduksi. Implikasi pendekatan rata-rata adalah perusahaan atau unit laba usaha harus menjual sebanyak-banyaknya (*maximum selling*) agar laba ( ) makin besar.

### 3. Pendekatan Marjinal (*Marginal Approach*)

Analisis marginal mirip dengan analisis mencari kepuasan maksimum. Analisis ini mendasarkan pada satu konsep yaitu keuntungan marginal yakni tambahan keuntungan total sebagai akibat tambahan satu unit output. Untuk mencari jumlah output yang menghasilkan keuntungan maksimum dapat digunakan patokan sebagai berikut: jika keuntungan marginal masih positif dengan menambah satu unit output maka output harus ditambah. Apabila keuntungan marginal negatif dengan menambah satu unit output maka output harus dikurangi sampai keuntungan atau laba marginal = 0.

Dalam pendekatan marjinal, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marjinal ( $MC$ ) dan pendapatan marjinal ( $MR$ ). Laba maksimum akan tercapai pada saat  $MR = MC$ . Kondisi tersebut dapat dijelaskan secara matematis dan grafis.

- Penjelasan secara matematis

$$= TR - TC \dots\dots\dots(2.5)$$

Laba maksimum tercapai bila turunan pertama fungsi  $(\pi / Q)$  sama dengan nol dan nilainya sama dengan nilai turunan pertama  $TR (\pi / Q)$  atau MC)

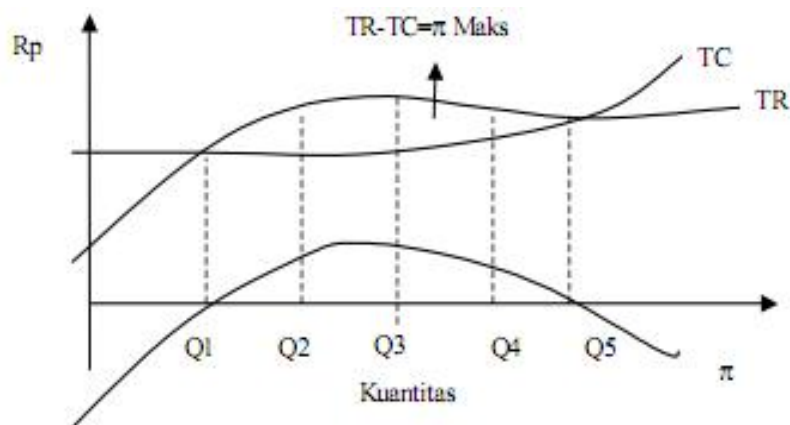
$$\frac{df}{dQ} = \frac{dTR}{dQ} - \frac{dTC}{dQ} = 0$$

$MR=MC \implies$  Maksimum atau kerugian minimum

- Penjelasan secara Grafik

Kurva pendapatan total (TR) diperoleh dengan cara mengalikan kurva produksi total (TP) dengan harga jual output per unit (P). TC menghasilkan kurva laba ( $\pi$ ) seperti tampak dalam gambar dibawah ini

Gambar 5.  
Kurva TR,TC dan laba (Pendekatan Marginal)



Pada gambar diatas terlihat bahwa tingkat output yang memberikan laba adalah interval  $Q_1$ - $Q_2$ . Jika output dibawah jumlah  $Q_1$ , perusahaan akan mencapai laba



maksimum disalah satu titik antara  $Q_1$ - $Q_5$ . Dalam gambar 2.2 terlihat bahwa laba maksimum tercapai jika produksinya adalah  $Q_3$ .

Secara grafis hal itu terlihat dari kurva yang mencapai nilai maksimum pada saat output sebesar  $Q_3$ . Pada pembuktian secara matematis telah diketahui nilai akan maksimum bila  $MR = MC$  dalam grafis kondisi itu terbukti dengan membandingkan dua garis singgung  $b_1$  dan  $b_2$ . Garis singgung  $b_1$  adalah turunan pertama fungsi  $TR$  atau sama dengan  $MR$ . Garis singgung  $b_2$  adalah turunan pertama fungsi  $TC$  atau sama dengan  $MC$ . Karena melihat garis singgung  $b_1$  sejajar garis singgung  $b_2$  yang artinya  $MR = MC$ .

#### **D. Angsuran Pinjaman Sebagai Tingkat Pendapatan KSM**

Sesuai dengan SKIM Dana Bergulir yang dibuat maka KSM yang telah meminjam dana bergulir wajib melakukan pembayaran kembali atas pinjamannya. Bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya baik terjamin keberlanjutannya baik melalui dana BLM maupun melalui dana hasil *chanelling*, sedangkan KSM yang kinerja pengembaliannya tidak baik maka tidak akan mendapatkan tambahan pinjaman dan dapat terkena saksi wilayah.

Kemampuan jangka pendek KSM untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo dan memenuhi kebutuhan kasnya yang tidak terduga menunjukkan KSM tersebut telah dapat meningkatkan pendapatannya dimana KSM telah dapat mengurangi hutang dan menambah kekayaannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Skousen, Stice dan Stice (2010: p161) "*revenues are inflows or other enhancements of*

*assets of an entity or settlements of its liabilities (or a combination of both) from delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities that constitute the entity's ongoing major or central operations*". Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas *central* yang sedang berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah peningkatan *asset* atau pengurangan *liabilities* karena aktivitas bisnis perusahaan yang menyebabkan terjadinya perubahan ekuitas.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Sri Widayati 20013 Pemberdayaan Ekonomi Melalui Dana Bergulir PNPM Mandiri Bagi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Sraten Kabupaten Semarang. Responden penelitian sebanyak 22 orang yang mewakili beberapa bidang usaha dari 11 kelompok. Pengambilan data melalui wawancara dan angket. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simpan pinjam pada PNPM yang dikelola oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak jauh berbeda dengan lembaga simpan pinjam yang telah ada baik prosedur maupun tingkat suku bunga (1,5% ) dengan sistem flat rate yang diangsur selama 12 bulan. Plafon pinjaman sebesar Rp 1.500.000,00 sampai Rp 2.000.000,00. Ternyata, tambahan modal usaha yang diberikan belum dapat meningkatkan usaha maupun produktivitas.

Penelitian Devi Nafiana 2011, Pengaruh Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Di Kota Tasikmalaya Metode penarikan sampel dilakukan secara Proporsional Random Sampling yaitu dengan mengambil sampel rumah tangga penerima bantuan secara acak yang tersebar di Kota Tasikmalaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Cross Section. berupa data primer dengan 110 sampel rumah tangga penerima bantuan pinjaman bergulir pada tahun 2011 yang tersebar di 69 kelurahan di Kota Tasikmalaya. Survey dilakukan pada tahun 2012, hasil penelitian diperoleh bahwa pemberian pinjaman modal PNPM-MP dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan konsumsi per kapita rumah tangga sebesar 0,27%. (2) Pengaruh karakteristik rumah tangga memiliki variasi arah dan tingkat signifikansi, diantaranya usia kepala rumah tangga berpengaruh positif tidak secara signifikan, Jenis kelamin kepala rumah tangga juga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, jumlah anggota rumah tangga yang berusia di bawah 15 tahun sesuai dengan hipotesis penelitian berpengaruh secara negatif dan signifikan sebesar 0,18%.

Penelitian Purwati Lestari 2013 Pengaruh Kredit SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP Terhadap Pendapatan Masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah warga desa Lanji Kec Patebon Kab Kendal, yang menerima manfaat dari kredit SPP PNPM-MP sejumlah 23 orang. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil semua anggota populasi tersebut sebagai responden penelitian, sejumlah 23 warga. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan

wawancara, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif antara Kredit SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP dengan penghasilan masyarakat Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Diketahui bahwa nilai thitung adalah 20,710, hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan ttabel pada taraf signifikansi 5% maupun 1% dengan  $df = 22$  sehingga diperoleh  $t(0,05;22) = 1,717$  dan  $t(0,1;22) = 2,508$ . Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan bahwa hipotesa  $H_a$  yang berbunyi ada pengaruh kredit SPP (Simpan-Pinjam Kelompok Perempuan) PNPM-MP terhadap pendapatan masyarakat diterima.

Penelitian yang dilakukan oleh Surya (2012) tentang “Analisis Kinerja Dana Bergulir PNPM Mandiri di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang” pada tahun 2011. Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang merupakan salah satu tempat yang menerima program PNPM Mandiri Perkotaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kinerja keuangan dan sosial ekonomi usaha mikro dan kecil anggota KSM sebelum dan sesudah mendapat dana bantuan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah kinerja keuangan dan indikator sosial ekonomi usaha mikro kecil dan keluarganya pada waktu tertentu atau cross section. Dari hasil analisisnya mengungkapkan bahwa rasio likuiditas pada usaha mikro dan kecil anggota KSM yang mendapat bantuan Dana Bergulir PNPM MP sebagian besar tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan. Sementara itu rasio profitabilitas pada usaha mikro dan kecil anggota

KSM yang mendapat Dana Bergulir PNPM MP sebagian besar memperlihatkan perubahan yang nyata.

Penelitian yang dilakukan oleh Waskitho (2009) tentang “Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)” pada tahun 2009. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja dari program P2KP yang dilaksanakan di kota dianggap kurang berhasil. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Dari hasil analisisnya bahwa dalam proyek P2KP, fungsi pembinaan ini masih sangat minim. Pembinaan yang dilakukan oleh Fasilitator Kelurahan (Faskel) hanya menitikberatkan dalam pembuatan proposal sebagai syarat pengajuan pinjaman. Para Pengurus BKM juga tidak mendapatkan pelatihan yang memadai sehingga memungkinkan mereka bisa mengelola BKM dengan lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Mubarak (2010) tentang “Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan” pada tahun 2009. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan ditinjau dari aspek pengembangan kapasitas masyarakat, dengan sasaran penelitian yaitu mengkaji implementasi pengembangan kapasitas masyarakat, mengkaji sikap dan cara pandang masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat serta mengkaji derajat keberdayaan masyarakat di Desa Sastrodirjan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya adalah penelitian yang bersifat deduktif dengan metode analisis deskriptif

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat di Desa Sastrodirjan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemberdayaan dan telah berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat serta meningkatkan pemahamannya untuk berperan dalam pembangunan komunitasnya.

Penelitian Hesti 2009 tentang pengaruh variabel modal usaha, jumlah tenaga kerja, pengalaman usaha, dan tingkat pendidikan terhadap pendapatan pengrajin logam di Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pembuktian dari sebuah hipotesis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan kuesioner serta pengamatan langsung. Sampel yang digunakan sebanyak 60 pengrajin logam dengan teknik *simple random sampling*.

Analisis data menggunakan pengujian statistik dengan bantuan program E-views 3.0. Hasil penelitian menunjukkan dengan uji terhadap koefisien regresi secara parsial (uji t) dengan  $\alpha = 5\%$  menunjukkan dua variabel tenaga kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengrajin logam sedangkan variabel modal usaha dan pengalaman usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hasil Uji F dengan  $\alpha = 5\%$  menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel modal usaha, jumlah tenaga kerja, pengalaman usaha, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan pengrajin logam di kecamatan Cepogo, kabupaten Boyolali.